

HASIL MUSRENBANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI KLATEN, DUNIA USAHA SEPAKAT BANTU REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)



Sumber Gambar:

<https://koranbernas.id/rtlh-menjadi-program-unggulan-forum-csr-kabupaten-klaten>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Klaten menggelar musyawarah perencanaan pembangunan *corporate social responsibility* (Musrenbang CSR) di DPRD Klaten, Selasa (31/10/2023). Dalam Musrenbang itu, dunia usaha sepakat rehab rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi program unggulan forum CSR.

Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jajang Prihono, mengatakan kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten pada 2024 diarahkan untuk peningkatan kemajuan daerah yang didukung dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi berkelanjutan.

“Prioritas pembangunan 2024 ada lima, yakni penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi, pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan, penguatan peningkatan sarana prasarana wilayah yang berkualitas, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan suasana kondusif, wilayah dan pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kesiapsiagaan bencana,” kata Jajang Prihono berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Bagian Prokopim Setda Klaten.

Terkait pembiayaan pembangunan pada 2024, Jajang menjelaskan di antaranya bersumber dari Pemerintah Pusat melalui APBN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau APBD Provinsi, Pemerintah Kabupaten Klaten atau APBD Klaten, swasta seperti investasi, hibah, kemitraan, kerja sama dan CSR serta swadaya masyarakat.

Pada kesempatan itu, Jajang menyampaikan terima kasih kepada pimpinan perusahaan di Klaten yang sudah mengikuti Musrenbang CSR.

“Yang patut disyukuri dan bangga bahwa Musrenbang CSR ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia,” kata Jajang.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Klaten, Pandu Wirabangsa, mengatakan tema Musrenbang CSR tahun 2023 yakni *Sinergitas Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Aksi Program CSR Kabupaten Klaten Tahun 2024*. Dalam pemaparannya, Pandu mengatakan pertumbuhan ekonomi di Klaten mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,84 persen pada 2022.

Pandu menjelaskan hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif. Hal ini dikarenakan sudah melandainya pandemi Covid-19 yang berdampak pada mobilitas masyarakat mulai meningkat hingga perekonomian perlahan mulai bangkit kembali.

“Pada 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Klaten menurun sebesar 1,16 persen menjadi 12,33 persen. Hal ini disebabkan dengan mulainya aktivitas normal penduduk pascapandemi Covid-19,” ujar Pandu.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan pada 2022 setelah dua tahun sebelumnya mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19. Pada 2022, tingkat pengangguran terbuka turun sebesar 1,71 persen, yakni dari 5,48 persen di tahun 2021 menjadi 4,31 persen di tahun 2022.

Ketua Forum For Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) Klaten, Wahyu Hariadi, dalam paparannya, mengatakan tantangan pembangunan di Kabupaten Klaten pada 2024 di antaranya terbatasnya sumber daya pembiayaan pembangunan, belum optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam proses pembangunan, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, belum berkembangnya usaha ekonomi produktif, terbatasnya sumber daya lainnya dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat.

Tantangan lainnya yakni belum ada sinergisitas pelaksanaan program pembangunan daerah dengan program CSR.

Ketua Forum CSR Klaten yang juga Direktur Utama Bank Klaten, Tulus Yunianto, mengatakan Musrenbang CSR diikuti sekitar 100 peserta dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Klaten, para pelaku dunia usaha, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *stakeholder* lainnya.

Tujuannya untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan daerah dengan program CSR. Kegiatan itu sekaligus dimaksudkan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR serta meningkatkan kemitraan antara dunia usaha dengan pemerintah daerah dan membantu percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pelaporan nilai tertinggi CSR semua perusahaan yang dihimpun Forum CSR Kabupaten Klaten dicapai pada 2016, sebesar Rp19.435.585.750. Pada 2021 mengalami penurunan menjadi Rp13.858.255.612 dikarenakan perekonomian daerah kala itu baru mulai bangkit kembali akibat pandemi Covid-19.

Pada 2022, nilai CSR di Klaten mengalami sedikit penurunan menjadi Rp13.854.791.882 dan tahun 2023 sampai bulan Oktober 2023 laporan yang masuk baru sebesar Rp5.675.837.357.

“Sedangkan akumulasi keseluruhan CSR dari tahun 2012 sampai dengan saat ini sebesar Rp128.874.150.582. Melalui Musrenbang CSR 2023 disepakati program unggulan berupa rehab RTLH karena saat ini Pemkab Klaten yang dipimpin Bupati Klaten, Sri Mulyani, baru berkonsentrasi pada rehab rumah warga yang masuk kategori RTLH. Sehingga melalui program CSR, nantinya semua warga Klaten dapat menempati rumah layak huni,” ujar Tulus.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/hasil-musrenbang-csr-di-klaten-dunia-usaha-sepakat-bantu-rehab-rtlh-1782840>, “Hasil Musrenbang CSR di Klaten, Dunia Usaha Sepakat Bantu Rehab RTLH”, tanggal 1 November 2023.
2. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/0510708378/akumulasi-csr-klaten-capai-rp-128-miliar-rehab-rtlh-jadi-program-unggulan-forum-csr>, “Akumulasi CSR Klaten Capai Rp128 Miliar, rehab RTLH Jadi Program Unggulan Forum CSR”, tanggal 1 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Prioritas pembangunan 2024 ada lima, yakni penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi, pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan, penguatan peningkatan sarana prasarana wilayah yang berkualitas, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan suasana kondusif, wilayah dan pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kesiapsiagaan bencana pembiayaan pembangunan pada 2024 bersumber dari Pemerintah Pusat melalui APBN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau APBD Provinsi, Pemerintah Kabupaten Klaten atau APBD Klaten, swasta seperti investasi, hibah, kemitraan, kerja sama dan CSR serta swadaya masyarakat.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.³
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁴
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.⁵

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.forummediaonline.com/2022/10/06/proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

⁴ Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

⁵ *Ibid*

- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.
- Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
- Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
- Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
- Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan).
- RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi